

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 137 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PINJAMAN LUAR  
NEGERI UNTUK OPTIMALISASI PELAKU USAHA NASIONAL**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan regulasi untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang sumber pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri, perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri untuk Optimalisasi Pelaku Usaha Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri untuk Optimalisasi Pelaku Usaha Nasional;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PINJAMAN LUAR NEGERI UNTUK OPTIMALISASI PELAKU USAHA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri untuk Optimalisasi Pelaku Usaha Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pengelolaan pinjaman luar negeri untuk mengoptimalkan kesempatan pelaku usaha nasional dalam memanfaatkan pasar dalam negeri;
- b. Menyusun kebijakan dan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penguatan kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pelaku usaha nasional; dan
- c. Menyusun strategi kolaborasi antara pemerintah dengan negara atau institusi internasional pemberi pinjaman luar negeri (*Mitra Pembangunan/ Development Partners*).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 4 (empat) bulan dihitung dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2021  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
PINJAMAN LUAR NEGERI UNTUK  
OPTIMALISASI PELAKU USAHA  
NASIONAL

NOMOR : 137 Tahun 2021  
TANGGAL : 7 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN  
STRATEGI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
PINJAMAN LUAR NEGERI UNTUK OPTIMALISASI PELAKU USAHA NASIONAL

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Pengarah	:	1. Roni Dwi Susanto 2. Robin Asad Suryo
2.	Ketua	:	Sarah Sadiqa
3.	Wakil Ketua	:	Sutan Suangkupon Lubis
4.	Sekretaris	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih
5.	Anggota	:	1. Gusmelinda Rahmi 2. Suharti 3. Emin Adhy Muhaemin 4. Fadli Arif 5. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 6. Theodore Sutarto 7. Ari Sulindra 8. Arif Rachman 9. Gigih Pribadi 10. Widya Prima Sari Fultanegara 11. Anita Carollin

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
		12. Sri Aditya Nur Pratama 13. Hestri Rokayah 14. Ferisa Rahmani 15. Hajeng Hayu Wandhira 16. Eristya Dessy Astarina 17. Mahendra Gilang Ramadhynara 18. Rahmat Fitriadi Herman 19. Ayu Prisca Adriani 20. Sasti Khoirunnisa 21. Aditya Mahfuzha 22. Cholida Ziah 23. Yuli Anita Setyowati

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO